

Hasil Penelitian

POTENSI IUPHHK-HTI MELALUI SISTEM WANATERNAK DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA DAGING

(POTENTIAL OF IUPHHK-HTI THROUGH SILVOPASTURAL SYSTEM IN SUPPORTING MEAT SELF-SUFFICIENCY)

Johansen Silalahi, Rospita Odorlina P. Situmorang, Pratiara

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli
Jl. Raya Parapat Km 10,5 Desa Sibaganding Parapat, Sumatera Utara 21174, Indonesia
email: johansen_silalahi@yahoo.com

Diterima: 23 Oktober 2019; Direvisi: 24 Februari 2020; Disetujui: 17 Maret 2020

ABSTRAK

Isu pangan adalah isu global yang sangat penting dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) pada tujuan kedua yaitu zero hunger. Penelitian ini sangat penting dalam rangka mendukung kegiatan swasembada pangan/daging nasional di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan mengkaji potensi dan peluang hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dalam mendukung program swasembada daging nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari instansi dan studi pustaka yang terkait dengan topik penelitian ini. Pengolahan data dilakukan setelah data sekunder diperoleh dengan cara mentabulasikannya dan menguraikan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 dengan sifat desk study. Hasil dari studi ini adalah peningkatan produksi peternakan untuk mendukung swasembada daging nasional dengan konsep wanaternakan (silvopastura) sangat potensial untuk diterapkan di areal hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) karena dari aspek luasan yang mencukupi untuk pemenuhan sumber pakan dan adanya aspek hukum kewajiban pengalokasian 20 persen kawasan konsesi HTI untuk kawasan tanaman kehidupan yang dapat diaplikasikan dengan pengembangan wanaternakan. Berdasarkan peraturan tanggungjawab perusahaan (CSR), pengembangan wanaternakan juga memiliki peluang dengan adanya kesempatan petani-peternak di sekitar HTI mendapatkan pembinaan dan pemberian modal untuk kegiatan peternakan di sekitar kawan HTI. Sehingga dengan menggabungkan kedua peraturan ini, peluang IUPHHK-HTI untuk mendukung produksi daging nasional cukup menjanjikan, seperti halnya dalam penelitian ini kawasan HTI dapat menyuplai kebutuhan daging sapi sebesar 129.709.022 kg per tahun atau sebesar 1,97 persen dari 6,6 juta ton kebutuhan daging nasional agar tercapai swasembada daging. Potensi ini masih dapat ditingkatkan jika skema penggembalaan di bawah tegakan hutan produksi atau pengambilan pakan dari kawasan hutan dan mix farming berberapa hewan ternak sekaligus dalam suatu kawasan dapat direalisasikan.

Kata kunci: IUPHHK-HTI, wanaternakan, swasembada, daging, potensi

ABSTRACT

The food issue is a global issue that is very important in supporting the second goal of sustainable development goals (SDGs) i.e. zero hunger. This research is very important to support national food/meat self-sufficiency activities in Indonesia. The purpose of the study was to describe and to examine the potential and opportunities of industrial plantations (IUPHHK-HTI) in supporting the national meat self-sufficiency program. This research was a descriptive approach and it was analyzed qualitatively. The data were obtained from secondary data from institutions and literature studies related to this research topic. Data analysis was carried out after gaining of secondary data and continued to tabulate and to describe them by referring to the research objective. The study was conducted in October 2019 with the nature of desk study. The result of this study showed that the increasing livestock production to support national meat self-sufficiency through silvopasture system is very potential to be applied in industrial plantation forest areas (IUPHHK-HTI) because of the aspect of sufficient area for the fulfillment animal feed and the legal aspects of the obligations of 20 percent of industrial forest concession areas for living plantations which can be applied to the

development of silvopasture. Based on the corporate responsibility regulations (CSR) regulation, the development of silvopasture also has the opportunity to be implemented through the opportunity for farmers around the HTI in CSR activities to receive guidance and capital for animal husbandry activities. Hence, through combining these two regulations, the opportunity of IUPHHK-HTI to support national meat production is quite promising, as, in this study, HTI can supply beef demand of 129,709,022 kg per year or 1.97 percent of 6.6 million tons of national meat needs to achieve meat self-sufficiency. This potential can still be increased if the grazing scheme under production forest stands or fodder from the forest area and mix farming of livestock at once in an area can be realized.

Keywords: IUPHHK-HTI, silvopasture, self-sufficiency, meat, potential

PENDAHULUAN

Isu pangan dewasa ini mendapat perhatian dunia oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama pada tujuan kedua yaitu *zero hunger* (nihil akan kelaparan). Badan Pangan Dunia memiliki misi untuk mengurangi kelaparan dunia dengan tekad *zero hunger* terutama pada negara-negara yang masih mengalami masalah kelaparan. Isu ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga isu ini sangat sensitif jika tidak diatasi secara tepat dan akurat.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga mengalami permasalahan pada ketahanan pangan terutama kebutuhan akan daging yang selalu defisit. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor sejumlah ternak penghasil daging seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan ternak lainnya beserta daging segar dan olahannya untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Laporan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018) atas neraca ekspor impor sub sektor peternakan per Maret 2018 menyebutkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit pemenuhan kebutuhan produk-produk hewani seperti daging dan produk-produk peternakan lainnya yang jumlahnya mencapai 106,8 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada daging masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan daging secara nasional masih menjadi target perhatian pemerintah saat ini. Hal ini tentunya agar konsumsi daging dapat meningkat dan produksinya dapat terpenuhi. Kementerian Pertanian (2018) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan bahwa konsumsi daging perkapita tahun 2017 di Indonesia adalah sebesar 7,35 kg per kapita per tahun. Jumlah ini masih jauh dibawah standar yang dikeluarkan oleh badan pangan dunia tahun 2010 yang menyebutkan bahwa kebutuhan daging rata-rata global per tahun per kapita mencapai 37 kg dan 25 kg/kapita/tahun untuk negara-negara berkembang (FAO, 1995). Produksi daging di

Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,47 juta ton (Kementerian Pertanian, 2018), sementara kebutuhan ideal daging nasional sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO (World Health Organization) untuk negara-negara berkembang jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 6,6 juta ton. Hal akan memberikan tantangan kepada pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan tetap meminimalkan impor daging.

Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa beberapa permasalahan dalam swasembada daging nasional khususnya pada ternak-ternak besar seperti sapi adalah kepastian lahan pengembangan peternakan dan kurangnya koordinasi antara pihak yang berkepentingan dalam swasembada daging (Marta, 2015; Nuhung, 2015; Saputra, et al., 2016). Keterbatasan lahan mengakibatkan kebutuhan pakan yang tidak mencukupi. Disamping itu sistem pengelolaan peternakan dengan cara penggembalaan masih menjadi alternatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Semakin menyempitnya areal pertanian dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan pertanian juga mengancam sektor peternakan (Rusdiana dan Adawiyah, 2013; Mulyani et al., 2016). Oleh karena itu, keterlibatan berbagai stakeholder khususnya pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk mendukung sektor peternakan dan untuk menjamin legalitas pemakaian lahan sangat dibutuhkan.

Salah satu program integrasi lintas sektoral untuk mendukung swasembada daging yang sudah dikembangkan adalah kolaborasi bidang perkebunan dengan peternakan yang disebut dengan program Integrasi Usaha Sawit-Sapi. Kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/PD.300/8/2014 tersebut adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini bersifat mutualisme karena selain memanfaatkan lahan sebagai kawasan penggembalaan, produk samping usaha perkebunan kelapa sawit seperti bungkil inti sawit, lumpur sawit, dan lain-lain

juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pakan ternak. Sementara produk-produk sampingan peternakan seperti pupuk kandang dan biogas dapat digunakan untuk perkebunan maupun untuk keperluan industri kelapa sawit.

Integrasi program pemerintah dalam penyediaan lahan yang cukup untuk program swasembada daging yang juga potensial adalah di sektor kehutanan. Luas hutan Indonesia yang mencapai 120,73 juta ha (BPS, 2018) merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial untuk mencapai swasembada pangan termasuk swasembada daging. Dalam penelitian Puspitojati (2013) dilaporkan bahwa kegiatan produksi berbagai produk untuk mendukung swasembada pangan dapat dilaksanakan di hutan lindung dan hutan produksi seperti hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan tanaman industri dan hutan tanaman yang dikelola bersama masyarakat. Subarudi (2010) juga menambahkan kegiatan-kegiatan integrasi antara lembaga-lembaga pemerintah dengan masyarakat yang dikenal dengan nama program wanaternakan atau silvopastura dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Dirjen Peternakan di areal hutan kemasyarakatan (HKM), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa (HD).

Meskipun program integrasi program bidang kehutanan dan peternakan sudah dimulai, namun hasil tersebut terlihat belum maksimal yang dibuktikan dengan difisit produksi daging yang masih terjadi hingga saat ini. Analisis peluang dan potensi kawasan hutan untuk mendukung swasembada daging harus terus dilakukan. Salah satu kawasan hutan yang memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk tujuan produksi adalah hutan tanaman industri (HTI). Pengelolaan HTI ditujukan untuk memproduksi produk-produk kehutanan baik dalam bentuk kayu maupun hasil non kayu yang diusakan dalam jumlah yang besar dan dalam kawasan yang cukup luas. Produksi hasil kayu dan non kayu dilakukan oleh pemegang ijin usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang biasanya berasal dari perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk-II/2015 mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) telah mengatur tentang tanggung jawab pemegang ijin usaha untuk melakukan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan disamping tanggung jawab pokoknya dalam memproduksi tanaman utama. Disamping itu, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 mengatur dengan jelas tentang

tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap perseroan (perusahaan) atas kegiatan pengelolaan alam atau yang berdampak terhadap lingkungan. Memperhatikan lahan HTI yang memadai untuk pengembangan peternakan seperti halnya kawasan-kawasan perkebunan di Indonesia dan dengan memperhatikan adanya aturan-aturan dalam IUPHHK-HTI, tulisan ini bermaksud untuk menguraikan dan sekaligus mengkaji potensi dan peluang hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dalam mendukung program swasembada daging nasional.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan potensi dan peluang IUPHHK-HTI dalam mendukung swasembada daging nasional di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba membandingkan pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong di sub-sektor perkebunan. Penelitian ini bersifat desk study yaitu pengumpulan bahan-bahan maupun referensi/literatur yang terkait dengan topik penelitian yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari instansi yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder berasal dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan beberapa publikasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Beberapa peraturan dan data yang dijadikan data sekunder pada penelitian ini adalah: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Kegiatan pengolahan data dilakukan setelah data sekunder diperoleh dengan cara mentabulisikannya dan menguraikan sesuai

dengan tujuan penelitian. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif untuk mengetahui potensi sektor kehutanan dalam hal ini IUPHHK-HTI dalam mendukung sektor peternakan secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspor-Impor Komotidi Sub-Sektor Peternakan. Ketahanan pangan yang dimaknai sebagai ketersediaan pangan yang cukup dari segi jumlah dan kualitas pada lokasi, waktu dan periode tertentu. Dalam menjamin ketersediaan pangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai stabilitas pangan termasuk didalamnya melakukan

eksport-impor berbagai produk-produk peternakan. Statistik ekspor-impor Sub-Sektor Peternakan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya defisit/kekurangan (impor lebih banyak daripada ekspor) pada periode tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dibidang sub-sektor peternakan belum layak dikatakan swasembada pangan karena kinerja di bidang sub-sektor peternakan masih belum efektif berjalan dengan baik. Sebagai gambaran yang lebih rinci, uraian produk-produk peternakan yang di ekspor dan impor dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Neraca Ekspor-Impor Sub-Sektor Peternakan tahun 2016 dan 2017

No.	Bidang	Ekspor (Juta USD)		Impor (Juta USD)		Selisih (Juta USD)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Peternakan	543,3	625,1	3.191,0	3.371	2.647,6	2.746,3

Sumber: Ditjen PKH Kementan RI (2018)

Tabel 2. Ekspor-Impor Sub-Sektor Peternakan tahun 2016 dan 2017

No.	Uraian Produk	Volume (ribu ton)					
		Ekspor		Impor		Selisih	
		Januari 2017	Januari 2018	Januari 2017	Januari 2018	Januari 2017	Januari 2018
1	Ternak	2.24	2.12	4.65	14.78	-2.41	-12.66
2	Hasil Ternak	8.41	8.95	55.39	37.8	-46.98	-28.85
3	Produksi hewani <i>non</i> pangan	0.43	0.31	9.7	10.35	-9.27	-10.04
4	Obat hewan	0.05	0.04	0.07	0.06	-0.02	-0.02
5	Lain-lain	2.6	4.51	56.22	66.43	-53.62	-61.92
Total		13.73	15.93	126.03	129.42	-112.3	-113.49

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018)

IUPHHK-HTI di Indonesia dan Peluangnya Mendukung Swasembada Daging. Program Wanaternak di Kawasan Hutan. Kombinasi antara kegiatan hutan dan ternak sering disebut silvopastura atau wanaternak. Subarudi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi sektor peternakan sangat potensial dalam mengatasi impor ternak demi pencapaian swasembada daging nasional. Konsep wanaternak atau silvopastura sangat cocok dikembangkan karena adanya hubungan mutualisme antara sektor kehutanan dan sub-sektor peternakan. Pohon maupun tanaman menurut Sharrow (1997) dapat memberikan makanan, memberikan naungan berteduh dan mengurangi kecepatan

angin sedangkan ternak dapat menyediakan sumber pangan kepada manusia seperti susu, daging, mengendalikan persaingan pohon dan berpartisipasi dalam siklus nutrisi dalam bentuk pupuk kandang.

Pola wanaternak banyak diupayakan untuk memaksimalkan lahan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Penelitian Muthmainnah dan Sribianti (2018) mengungkapkan bahwa pola pemanfaatan lahan hutan secara silvopastura dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan kepada 11 orang petani/peternak disebutkan bahwa mereka memperoleh keuntungan sekitar 1 juta hingga 4 juta/per ekor/tahun dari ternak sapi dan hasil

kayu jati putih dengan kisaran 912 ribu hingga 9,3 juta rupiah per tahun dari lahan yang berkisar antara hingga 0,5 hingga 2,4 hektar. Penelitian senada juga dilakukan oleh Lubis et al. (2016) dalam analisis ekonomi usaha wanaternakan. Penelitian tersebut melaporkan bahwa usaha wanaternakan dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap ekonomi rumah tangga hingga mencapai 52,56 % terhadap struktur ekonomi rumah tangga. Hal ini diperoleh dari mengusahakan lahan pertanian dengan tanaman-tanaman kehutanan dan tanaman keras seperti kakao dan karet dan menggabungkannya dengan usaha perternakan lembu, kambing, kerbau dan ayam. Hasil tersebut dapat meningkat tergantung luas lahan dan keseriusan petani yang mengusahakannya. Disebutkan demikian karena pola pikir petani yang masih menganggap usaha peternakan sebagai usaha sampingan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program wanaternakan ternyata juga sangat efektif dalam rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah kritis. Model silvopastura pada prakteknya sering dikombinasikan dengan agroforestri di wilayah-wilayah terbatas pemanfaatan seperti daerah-daerah dengan kelerengan yang tinggi, rawan longsor dan

daerah bervegetasi rendah. Hasil penelitian Njurumana (2008) di lahan-lahan kritis di Timor dan Sumba menyebutkan bahwa praktek agrosilvopasture (agroforestry dan silvopastura) sangat efektif dalam memperbaiki lahan-lahan kritis. Praktek agrosilvopasture yang dilakukan di lahan hutan, pertanian, hingga pekarangan yang sudah berjalan cukup lama di Timor dan Sumba dianggap menjadi salah satu solusi dalam mengurangi iklim yang kering dan kekurangan air yang merupakan salah satu permasalahan utama di daerah ini.

Perkembangan IUPHHK-HTI di Indonesia. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman industri pada hutan produksi atau yang biasa disebut IUPHHK-HTI adalah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Data statistik Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah unit manajemen dan luas kawasan HTI cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan IUPHHK-HTI Periode 2013-2017

No	Tahun	UM (Unit Manajemen)	Perkembangan IUPHHK-HTI (Ha)
1	2013	254	10.106.540,43
2	2014	277	10.539.210,33
3	2015	280	10.700.842,33
4	2016	286	10.842.974,77
5	2017	293	11.178.601,45

Sumber: Kemen LHK (2018)

Peningkatan kawasan jumlah unit manajemen maupun luas kawasan HTI menunjukkan semakin meningkatnya kawasan hutan yang dapat dibudidayakan. Berbeda dengan hutan lindung maupun konservasi, HTI yang terletak di kawasan hutan produksi dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan produksi kayu dan non kayu. Pola pertanaman yang dilakukan di kawasan HTI juga cenderung monokultur, yaitu mengusahakan satu jenis tanaman saja seperti tanaman jati, akasia, eukaliptus, pinus, meranti dan lain-lain dengan terdapat sejumlah tanaman bawah yang ada di lantai dasar hutan. Berbagai jenis tumbuhan bawah yang dapat tumbuh di kawasan HTI dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sebagai contoh beberapa jenis hijauan pakan ternak yang dapat tumbuh di kawasan hutan industri adalah rumput gajah, rumput raja, rumput benggala, daun lamtoro, kaliandra, turi, dan lain-lain. Tanaman-tanaman tersebut didapat dikonsumsi

oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.

Aspek hukum mendukung pengembangan peternakan di kawasan HTI.

Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sekarang dikenal dengan IUPHHK-HTI pada prakteknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan. Kewajiban pemegang ijin IUPHHK-HTI untuk memberikan tanggung jawab pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah di sekitarnya merupakan peluang yang dapat ditangkap dalam pengembangan wanaternakan di kawasan HTI dalam rangka pemenuhan swasembada daging (pangan). Secara ringkas berikut adalah aspek hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pengembangan peternakan di kawasan HTI.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015. Peraturan ini mengatur tentang pembangunan hutan tanaman industri. Dalam peraturan

tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur kewajiban pemegang ijin IUPHHK-HTI untuk melakukan kegiatan produksi yang mempertimbangkan aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar areal hutan industri dan kewajiban peruntukan 20% areal konsensi untuk areal tanaman kehidupan. Tanaman kehidupan adalah tanaman yang ditanam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berupa tanaman kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dapat dikelola secara agroforestry termasuk didalamnya dengan pola sivopastural (menggabungkan tanaman kehutanan dengan peternakan). Pengelolaannya adalah melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI. Sementara lokasi areal tanaman kehidupan difokuskan kepada kawasan hutan yang berkonflik dan atau yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat melalui pola pemberdayaan dan kemitraan. Dengan adanya peraturan ini, maka terdapat aspek hukum yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan peternakan di dalam dan di sekitar hutan tanaman industri dengan memanfaatkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tersebut.

2. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012. Peraturan ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas termasuk di dalamnya perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Dalam peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan mengidentifikasi, menganalisis, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang potensial dilakukan di sekitar wilayah konsesi untuk menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perusahaan dalam bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Beberapa situs perusahaan melaporkan berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan pengembangan peternakan maupun pengadaan ternak bagi kelompok. Seperti misalnya PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) mengadakan program Integrated Farming System (IFS) pada tahun 2016 yang memfokuskan kegiatan pelatihan dan budidaya Sapi Bali dan bantuan ternak sapi kepada kelompok tani (Ramadhan, 2018). Perusahaan lainnya yang bergerak di industri pulp yaitu PT. Toba Pulp Lestari (TPL) pada tahun 2015 menganggarkan program peternakan (livestock program) yang menyediakan sejumlah pelatihan, peralatan dan modal untuk pengembangan ternak babi di

Kabupaten Tobasa, Sumut, dan tahun 2016 menyerahkan 26 ekor ternak babi untuk dipelihara oleh kelompok petani. PT. Bumi Andalas Permai yang berada di Palembang memiliki program CSR Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dimulai pada tahun 2016 memberikan pelatihan, pembinaan, penyediaan bibit dan sarana usaha ternak sapi dan kambing bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dengan adanya sejumlah kegiatan CSR tersebut, hal ini membuktikan terdapat kegiatan wanaternak di sekitar kawasan hutan yang pelaksanaannya dapat ditingkatkan. Namun sayangnya, sejumlah dana CSR dari perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HTI untuk kegiatan peternakan atau mix farming masih sangat rendah karena kegiatan CSR di wilayah HTI mencakup banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana, pertanian/peternakan, peribadatan, pengembangan UKM, olah raga dan lain sebagainya (Ramadhan, 2018; Rahmadani, 2011). Pengadaan program CSR saat ini cenderung dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan untuk mengantisipasi konflik dengan masyarakat dan memenuhi kewajiban dalam laporan keuangan perusahaan.

Peluang Pengembangan Wanaternak di IUPHHK-HTI Mendukung Swasembada Daging. Merujuk pada data yang terdapat pada Tabel 3, disebutkan bahwa luas areal HTI di Indonesia pada tahun 2017 adalah 11.178.601, 45 Ha. Jika dilakukan acuan pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 yang menyebutkan bahwa 20 % areal konsensi wajib serahkan kepada masyarakat untuk tanaman kehidupan yang mana dalam hal ini dapat diimplementasikan dengan pola agroforestry atau dengan pola silvopastural (wanaternak), maka jumlah areal hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan ternak adalah seluas 2.235.720 Ha. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Clavijo et al. (2019) di sebuah kawasan hutan shelter belt yang berbatasan dengan kawasan hutan industri menyebutkan bahwa daya dukung (carrying capacity) kawasan hutan untuk pengembangan ternak sapi dengan pola silvopastural adalah sebesar 0,59 sapi per hektar. Jika hal tersebut diterapkan di kawasan HTI, maka kawasan hutan HTI di Indonesia dapat mendukung produksi sapi hingga 1.319.074 ekor. Dengan merujuk pada peluang produksi tersebut, maka simulasi peluang areal tanaman kehidupan dari kawasan kawasan HTI untuk mendukung produksi daging sapi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Simulasi perkiraan produksi daging pada areal tanaman kehidupan kawasan HTI

Luas kawasan HTI berpotensi untuk silvopastural (Ha)	Skema pemanfaatan kawasan	Potensi produksi sapi (ekor)	Produksi daging (kg) (FAO,1991)	
			Usia panen 3 tahun, rata-rata 295 kg karkas per ekor sapi	Produksi daging per tahun
2.235.720	100 %	1.319.075	389.127.066	129.709.022
	75 %	989.306	291.845.300	97.281.767
	50 %	659.537	194.563.533	64.854.511
	25 %	329.769	97.281.767	32.427.256

Sumber: Data penelitian (2019)

Dari hasil perkiraan pada Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa dengan skema optimum, kawasan areal tanaman kehidupan kawasan HTI dapat menyuplai daging sapi sebesar 129.709.022 kg. Angka ini berarti dapat menyuplai sebesar 1,97 persen dari 6,6 juta ton kebutuhan daging nasional agar tercapai swasembada daging. Skema di atas tentunya hanya memanfaatkan 20 % kawasan HTI yang dikelola secara silvopastural. Namun jika sistem silvopastura dapat dikembangkan dengan opsi pilihan lain seperti masyarakat diijinkan menggembalakan ternak di bawah tegakan hutan produksi atau mereka diijinkan mengambil pakan ternak dari kawasan hutan seperti halnya yang dilakukan pada banyak perkebunan kelapa sawit, maka potensi produksi daging sapi akan meningkat. Skema lainnya adalah jika dilakukan penggabungan beberapa jenis hewan ternak penghasil daging seperti kerbau, domba, kambing, ternak unggus, dan hewan ternak lainnya sekaligus dalam satu kawasan, maka peluang produksi untuk mengejar swasembada daging akan semakin meningkat.

Namun hingga saat ini, penguatan sektor peternakan di kawasan hutan tanaman industri untuk mendukung swasembada daging masih sangat minim sehingga hal ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Satu contoh yang dapat diambil adalah diperlukannya program kolaborasi peternakan dan kehutanan yang diterapkan secara nyata, seperti halnya sudah diterapkan Kementerian Pertanian dengan adanya program SISKAS (Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit) yaitu program usaha integrasi perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong. Program tersebut adalah pemberian izin legal kepada masyarakat melakukan peternakan dibawah tegakan sawit serta kegiatan pemanfaatan limbah sawit untuk dijadikan sebagai pakan ternak yang hingga saat ini cukup berhasil dalam meningkatkan produksi sapi dan sekaligus dapat memberikan

keuntungan ekonomi kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan. Edwina et al. (2019) mencatat bahwa secara produktivitas, perkebunan yang menerapkan SISKAS lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan yang tidak menerapkan SISKAS dan pendapatan perusahaan perkebunan yang menerapkan SISKAS lebih tinggi dari non SISKAS.

Belajar dari pengalaman positif yang sudah diterapkan di lingkup Kementerian Pertanian, dan adanya aspek legal dan potensi kawasan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus lebih serius lagi dalam mengelola wanaternak. Puspitojati (2013) memberikan alasan bahwa di areal HTI dan skema lainnya pada umumnya belum maksimal mendukung kebijakan swasembada tanaman pangan karena hanya fokus kepada semi-komersial dan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini dapat diatasi jika semua stakeholder yang terlibat duduk bersama dalam rangka mencapai swasembada pangan/daging. Peluang pengembangan wanaternak di kawasan HTI dapat dilakukan dengan memberikan kepastian ijin peternakan di bawah tegakan tanaman hutan, meningkatkan peran Unit Manajemen (UM) IUPHHK-HTI dalam menerapkan sistem kemitraan dengan masyarakat dengan pemberdayaannya dan mendorong kegiatan CSR yang lebih dapat merangsang usaha-usaha produktif dan memberi efek multiplier. Pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK juga dapat memberikan insentif bagi pemegang ijin IUPHHK-HTI yang sukses melaksanakan wanaternak atau silvopastura di arealnya untuk merangsang keberhasilan swasembada daging.

KESIMPULAN

Penerapan swasembada daging (sapi) nasional dengan konsep wanaternak (silvopastura) sangat potensial untuk diterapkan di areal hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) untuk mendukung pemenuhan produksi daging

untuk mencapai swasembada daging karena dari aspek luasan, hutan tanaman industri cukup luas untuk mendukung pemenuhan pakan ternak dengan berbagai tumbuhan bawah yang dapat dimanfaatkan untuk peternakan. Secara legal, pengembangan wanaternak sudah tercakup dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 yang mengatur kewajiban pemegang IUPHHK-HTI untuk mengalokasikan 20% kawasan konsesi untuk pengembangan tanaman kehidupan yang dapat diimplementasikan dengan pola wanaternak (silvopastura) dan adanya kewajiban CSR perusahaan untuk melakukan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat diimplemetasikan dengan pembinaan petani-peternak dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ternak. Sehingga dengan adanya sinkronisasi dari aplikasi kedua peraturan ini dapat meningkatkan produksi ternak penghasil daging. Potensi HTI dalam mendukung produksi daging dapat disimulasikan dengan pemanfaatan areal tanaman kehidupan untuk pengembangan wanaternak ternak sapi potong, dimana dari hasil simulasi tersebut kawasan HTI dapat menyuplai produksi daging sapi hingga 129.709.022 kg atau sebesar 1,97 persen dari 6,6 juta ton kebutuhan daging nasional agar tercapai swasembada daging. Jumlah ini tentunya ini juga masih dapat ditingkatkan jika skema penggembalaan di bawah tegakan hutan produksi atau pengambilan pakan dari kawasan hutan dan campuran produksi berberapa hewan ternak sekaligus dalam suatu kawasan dapat direalisasikan.

REKOMENDASI

1. Sektor kehutanan dalam hal ini IUPHHK-HTI sangat potensial dalam mendukung swasembada pangan/daging dengan konsep silvopastura dan sebaiknya dipertimbangan untuk dikembangkan di IUPHHK-HTI terutama milik pemerintah untuk selanjutnya dikembangkan ke yang lebih luas.
2. Kementerian LHK harus lebih lebih serius lagi dalam mengelola wanaternak dengan melibatkan stakeholder yang terlibat, meningkatkan peran Unit Manajemen IUPHHK-HTI dengan skema kemitraan dengan masyarakat dan mendorong kegiatan CSR ke usaha-usaha produktif dan berdampak ganda dan pemberian insentif bagi pemegang ijin IUPHHK-HTI yang sukses melaksanakan wanaternak atau silvopastura di arealnya untuk merangsang keberhasilan swasembada daging. Untuk itu diperlukan kepekaan stakeholder di sekitar

kawasan seperti pemerintah lokal dan kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan peluang tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BP2LHK Aek Nauli) atas saran dan motivasi dalam penulisan publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto, G., Sakti, D.K. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Statistik Peternakan 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan.

Clavijo, M.P., Cornaglia, P.S., Batisttella, A., Borodowski, E. 2019. Floristic enrichment of the understory increases forage production and carrying capacity of temperate silvopastoral systems. *Agrofor Syst*.

Ditjen PKH Kementan RI. 2018. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian RI.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018a. Perkembangan Ekspor-Impor sub sektor peternakan Maret 2018. News letter data makro, edisi 04/eksim/05/2018.

Edwina, S., Yusri, J., Yusmini, Maharani, E. 2019. Kajian Perbandingan Produktivitas dan Pendapatan Perkebunan Pola Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) Dengan Perkebunan Tanpa Pola SISKA di Kabupaten Siak. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 5(1) hal 90-103.

FAO. 1991. Guidelines for slaughtering, meat cutting and further processing. *FAO Animal Production and Health Paper* No. 91.

Food and Agriculture Organization (FAO). 1995. World Agriculture: towards 2010. An FAO Study. New York: FAO and John Wiley and Sons.

Kementerian Kehutanan. 1995. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Peraturan Kementan LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.
- Kementerian Pertanian RI. 2018. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2018. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, RI. Jakarta.
- Lubis, S., Latifah, S., dan Martial, T. 2016. Analisis pendapatan petani silvopastura di Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. *Peronema Forestry Science Journal* 5(2) hal 113 -124.
- Marta, Y. 2015. Sistem penggembalaan sebagai alternatif peternakan sapi potong yang efektif dan efisien. *Pastura* 5(1) hal 51-55.
- Mulyani, A. Kuncoro, D., Nursyamsi, D., Agus, F. 2016. Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah dan Iklim* 40(2) hal 121-133.
- Muthmainnah dan Sribianti, I. 2018. Pendapatan Masyarakat pada Komponen Silvopasture dan Agrisilvikultur Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 10(1) hal 136-144.
- Nuhung, I. A. 2015. Kinerja, Kendala, Dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33(1) hal 63-80.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Puspitojati, W. 2013. Kajian Kebijakan Pengembangan Pangan di Areal Hutan Tanaman Untuk Mendukung Swasembada Pangan. *Jurnal Analisis Kebijakan kehutanan* 10(2) hal 134-138.
- Ramadhan, R. 2018. Corporate Social Responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tahun 2015-2016. *Jom FISIP* 5(1) hal 1-14.
- Ramadhani, H.S. 2011. Studi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Nityasa Idola di Kalimantan Barat. Skripsi Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor.
- Rusdiana, S., Adawiyah, C.R. 2013. Analisis Ekonomi dan Prospek Usaha Tanaman dan Ternak Sapi di Lahan Perkebunan Kelapa. *SEPA* 10(1) hal 118-131.
- Saputra, J.I., Liman dan Widodo, J. 2016. Analisis potensi pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* 4(2) hal 115-123.
- Sharrow, S. 1997. The biology of silvopastoralism. Oregon State University, Corvallis, OR.
- Subarudi. 2010. Kebijakan Pengembangan Wanaternakan Nasional Yang Berkelanjutan (Policy for Development of Sustainable National Silvopastura). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(1) hal 47 – 61.